

## Analisis Dampak Anggaran Pertahanan Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Sistem Pertahanan Negara

Feny Avisha<sup>1</sup> Guntur Eko Saputro<sup>2</sup> R Lukman Yudho Prakoso<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [fenyavisha2211@gmail.com](mailto:fenyavisha2211@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Perkembangan dinamis dari lingkungan strategis akan menciptakan serangkaian ancaman, tantangan, serta risiko yang sangat kompleks. Perkembangan Lingstra tersebut selalu menghadirkan perubahan kompleksitas ancaman dan tantangan pertahanan negara. Semua unsur pertahanan negara memerlukan pengertian dan pemahaman tentang kompleksitas ancaman. Untuk itu, Departemen Pertahanan terus mengembangkan strategi serta kebijakan pertahanan yang pelaksanaannya memerlukan dukungan alutsista dari anggaran pertahanan di masa pandemi Covid-19. Potensi ancaman tersebut menjadi salah satu penyebab anggaran pertahanan berdampak pada sistem pertahanan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif, dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil analisa, Sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020, relokasi anggaran Kementerian Pertahanan dikurangi menjadi Rp. 122 triliun. Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menyusun rencana strategis pembangunan Kekuatan Utama Pertahanan (Bangquatpokhan) atau yang lebih dikenal dengan Minimum Essential Force (MEF) yang terdiri dari tiga rencana strategis strategis. Rencana Strategis I dimulai tahun 2010-2014, Rencana Strategis II 2015-2019 dan Rencana Strategis III 2020-2024. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi belanja pegawai adalah dengan mengoptimalkan kebijakan pertumbuhan nol yang telah diterapkan sejak tahun 2012. Kebijakan pemerintah adalah perombakan birokrasi pertahanan departemen SDM yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk mencapai keseimbangan antara jumlah orang dan jumlah pos. Kebijakan tersebut dinilai penting di masa pandemi COVID-19 karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran pertahanan. Dalam implementasi kebijakan tersebut, penguatan riset di bidang industri pertahanan juga harus didukung penuh, agar Indonesia tidak dapat bergantung pada alutsista yang diimpor dari negara lain.

**Kata Kunci:** Anggaran Pertahanan, Pandemi Covid-19, Sistem Pertahanan Negara

### Abstract

*The dynamics of the development of strategic created spektur threat environment, the challenges and complex risk. The development of strategic environment is bringing about a change to the complexity of the threat and a challenge to the defense of the country. Need to understand the complexity and understandable by all elements of the defense of the country. For it, the defence ministry continue to develop strategies and policies of state defense and their implementation need the support defense budget provided covid pandemic 19 against the system of state defense. Potential threats has been one of background the impact of defense budget provided pandemic covid-19 against the system of state defense. Is a qualitative study methods used, with a main library as a technique of data collection. The results of the analysis, Once it's realocation based on the 54-year press of 2020, then budgets are reduced to as much as rp.122 trillion. The previous state had a strategic plan for building the force of defense (default ) or more commonly known as the minimum escential forces (mef) consisting of three Rencana Strategis. The Rencana Strategis i started in 2010 - 2014, li Rencana Strategis 2015-2019 and Rencana Strategis iii 2020 2024. The government's policy of suppressing employee shopping is to optimize the policy of zero growth polycy that has existed since 2012. This policy is a bureaucratic reform in the field of defense that aims to maximize quality over quantity in order to bring balance of personnel and office. This policy feels very relevant in the Covid-19 pandemic because it can increase the efficiency and effectiveness of the defense budget. As far as policy goes, The strengthening of defense industry research must also be fully supported*

**Keywords:** Defense budget, covid-19 pandemic, state security system



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Krisis kesehatan global yang terjadi dalam kurun triwulan I tahun 2020 berdampak terhdap kinerja perekonomian domestik. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 2,97%. Hampir semua industri tumbuh dengan lambat. Hal ini dikarenakan oleh penurunan permintaan global serta domestik dan melemahnya harga komoditas internasional. Namun, situasi ini lebih baik daripada hasil negara lain. Seperti negara-negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Prakiraan pertumbuhan awal sebesar 5,3 persen pada tahun 2020 direvisi menjadi -0,4 - 2,3 persen, dengan mempertimbangkan perlambatan di hampir semua item PDB. Karena COVID-19, pemerintah memperkenalkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 695,2 triliun. Sebagian anggaran PEN berasal dari redistribusi anggaran di tingkat kementerian dan/atau lembaga nasional. Kementerian Pertahanan (Kemhan) memiliki anggaran terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia yaitu Rp. APBN tahun 2020 sebesar 131 triliun.

Anggaran Kementerian Pertahanan terdiri dari tiga bagian, yaitu belanja pegawai, belanja material, dan belanja modal. Lima unit kelembagaan (Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes TNI AL, Mabes TNI AU, dan Mabes TNI) memiliki proporsi anggaran belanja pegawai yang lebih besar dibandingkan dua komponen lainnya. Sesuai Perpres No. 54 tahun 2020, anggaran Kementerian Pertahanan dikurangi menjadi Rp. 122T. Kementerian Pertahanan dulu memiliki rencana strategis pengembangan kekuatan utama pertahanan (Bangkuatpokhan) atau lebih dikenal MEF (Minimum Essential Forces), yang terdiri dari tiga rencana strategis strategis. Rencana Strategis I mulai tahun 2010 - 2014, Rencana Strategis-II tahun 2015 - 2019 serta Rencana Strategis-III tahun 2020-2024<sup>1</sup>. Renstra tersebut bertujuan untuk memodernisasi sistem pertahanan utama (Alutsista) Indonesia yang akan menjadi kekuatan yang disegani di kawasan ASEAN serta dunia pada umumnya. Tak hanya itu, Rencana Strategis tersebut pun mencakup pengembangan sumber daya manusia, organisasi, dan infrastruktur pertahanan. Akibat pandemi COVID-19, agenda pembangunan Departemen Pertahanan terhambat karena sebagian anggaran telah dialokasikan untuk program PEN.

Menurut data Departemen Pertahanan, penyelesaian Rencana Strategis II baru mencapai 63,19% dari sasaran Rencana Strategis II yang seharusnya mencapai 75,54%. Pada tahun 2020, dibandingkan dengan sasaran "Rencana Strategis-II", masih terdapat kesenjangan yang besar sekitar 12,35%. Ini merupakan operasi tersendiri Kementerian Pertahanan 2021 - 2022, selain perekonomian nasional yang masih dalam tahap pemulihan akibat dampak COVID-19, untuk mengejar target pemulihan ekonomi dan pemenuhan alutsista. Perubahan perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman, tantangan dan risiko yang kompleks. Evolusi lingkungan strategis selalu mengarah pada perubahan kompleksitas ancaman serta tantangan pertahanan negara. Seluruh elemen pertahanan negara harus memahami dan memahami kompleksitas ancaman. Oleh karena itu, Kemhan terus merancang strategi serta kebijakan pertahanan negara, dan untuk mengimplementasikannya, sistem pertahanan negara membutuhkan dukungan anggaran pertahanan di masa pandemi Covid-19. Tulisan ini mengulas bagaimana dampak Anggaran Pertahanan dimasa pandemi Covid 19 terhadap Sistem Pertahanan Negara. Penulis berasumsi bahwa tulisan ini nantinya akan

<sup>1</sup> Akhmad Hanan. *Alokasi Anggaran Pertahanan Terganjil Covid-19*. Diakses dari: [cnbcindonesia.com/opini/20201228134247-14-211927/alokasi-anggaran-pertahanan-terganjal-covid-19](https://cnbcindonesia.com/opini/20201228134247-14-211927/alokasi-anggaran-pertahanan-terganjal-covid-19). Diakses pada 27 Desember 2022.

menjadi momentum bagi Indonesia untuk dapat membangkitkan industri pertahanan dalam negeri terutama untuk terus berinovasi menciptakan teknologi pertahanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah pertahanan Indonesia guna memanfaatkan anggaran pertahanan yang terbatas, serta upaya sebagai negara pencipta industri pertahanan untuk menunjang ekonomi pertahanan yang mandiri untuk mendukung penguatan sistem pertahanan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut, peneliti menggunakan studi kualitatif, dengan kajian pustaka sebagai metode pengumpulan data utama. Jurnal, buku, arsip, surat kabar, internet, dan publikasi perdagangan online disisir untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan, yang kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hampir semua negara-negara dunia saat ini sedang mengalami pandemi penyakit corona virus 19, yang pertama kali dimulai pada Desember 2019 dari sebuah pasar di Wuhan, China, dan telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh China dalam dua bulan tersebut. Mempertimbangkan wabah yang sedang berlangsung di Tiongkok dan penyebaran cepat coronavirus 2019 di seluruh dunia yang disebabkan oleh SARS-Cov-2 (Susiolo, et.al, 2020). Indonesia juga tidak kebal terhadap pandemi, setelah mendeteksi kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020. Faktanya, lebih dari 2.000 orang dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut dan jumlah kematian melebihi 200 per 6 April 2020. Lantas Pemerintahpun kemudian memberlakukan pembatasan sosial yang luas serta kebijakan stabilitas ekonomi dan keuangan sebagai respons terhadap ancaman Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan yang sangat penting dalam kehidupan nyata masyarakat. Wabah Covid-19 tentunya akan berdampak pada berbagai bidang ekonomi politik, politik, hukum serta kesehatan. (Pelupessy, Hafidz & Djanggih, 2021).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa keputusan untuk menangani Covid-19, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2020. 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pembatasan Sosial Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid). -19) (Hasrul, 2020). Terakhir, dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam akibat penyebaran penyakit virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana alam tidak wajar akibat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pokok pikiran dari keppres tersebut adalah bahwa bencana alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 akan berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian harta benda, semakin luasnya cakupan wilayah akibat bencana Covid-19, dan dampak terhadap berbagai aspek sosial masyarakat. (Yuza & Dилоva, 2020).

Meski seluruh elemen bangsa saat ini bekerja keras untuk melawan pandemi Covid-19, Indonesia tidak boleh lupa untuk memperkuat sektor pertahanan dan keamanan. Karena itu, masyarakat tak perlu khawatir dengan anggaran Rp 1.750 triliun yang disiapkan pemerintah untuk alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Anggaran pertahanan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sumber pembiayaan guna menjamin dan memperkuat keamanan negara terhadap ancaman militer baik fisik (nyata) maupun psikologis (persepsi), internal maupun eksternal. Perhatian utama dari anggaran pertahanan adalah

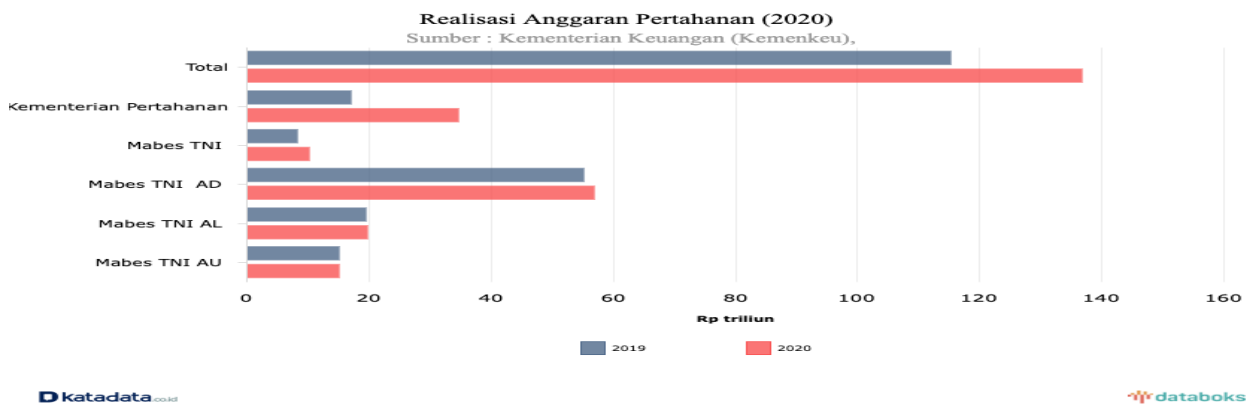
penciptaan, pemeliharaan dan perlengkapan angkatan bersenjata. Tujuan pembelanjaan pertahanan adalah untuk memastikan pertahanan militer negara dan wilayahnya yang kuat serta keamanan warga negara. Pengeluaran pertahanan tetap dibutuhkan sebagai fungsi yang sangat penting untuk melindungi sumber daya negara yang sangat besar. Tekad ini selalu datang dengan berbagai kepentingan dan ketidakpastian.

Menurut Kementerian Pertahanan, anggaran pertahanan didefinisikan sebagai berikut: "Rencana kerja keuangan pertahanan yang disusun secara sistematis yang mencakup jumlah maksimum pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kepentingan negara dalam jangka waktu tertentu dan perkiraan biaya. pendapatan (pendapatan) yang dapat diperoleh selama periode itu." Anggaran pertahanan merupakan anggaran publik yang ditujukan untuk semua tujuan yang berkaitan dengan pertahanan negara dan bangsa, yang besar kecilnya berkaitan erat dengan kemampuan dan prioritas pembangunan negara. Pembangunan kekuatan militer selalu menghadapi masalah sumber daya yang terbatas, termasuk sumber keuangan publik. Ketersediaan kekuatan militer untuk beradaptasi dengan perubahan selalu didahulukan sebelum pilihan prioritas kebijakan negara lainnya. Penguatan kekuatan militer sebagai komponen kunci pertahanan dicapai melalui inisiatif mobilisasi, perluasan atau perluasan kekuatan militer, dan peningkatan kemampuan pencegahan/respons. Modal penting dalam pembangunan itu semua adalah anggaran pertahanan (Anggoro, 2004).

Chrisnandi (2007) menyatakan bahwa salah satu unsur utama dalam merancang strategi pertahanan adalah merancang besarnya anggaran pertahanan negara. Selain posisi dan struktur pertahanan, komponen anggaran sangat penting, karena anggaran merupakan salah satu kunci pemenuhan kekuasaan umum negara. Menurut Castillo dalam Kennedy (2016), dari rangkuman pendapat ahli yang berbeda, seseorang dapat menargetkan tiga hipotesis tentang mengapa suatu negara meningkatkan pengeluarannya, yaitu:

1. Pengeluaran pertahanan suatu negara tergantung pada tingkat keamanannya. Semakin tinggi tingkat ancaman eksternal yang dirasakan oleh para pengambil keputusan, semakin tinggi belanja pertahanan negara. Negara-negara khawatir dan meningkatkan pengeluaran militer mereka sebagai tanggapan atas ancaman tersebut. Hipotesis ini juga disebut hipotesis ketakutan.
2. Negara ambisius dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat mencoba mempengaruhi dunia internasional dengan meningkatkan pengeluarannya. Semakin besar kemakmuran ekonomi suatu negara, semakin besar pengeluarannya. Hipotesis ini juga disebut hipotesis ambisi.
3. Pemimpin pemerintah menggunakan kebijakan internasional mereka untuk mengelola masalah domestik. Ketika pemerintah merasa mereka akan kehilangan legitimasi, mereka mengejar kebijakan luar negeri yang ekspansif dan meningkatkan pembelanjaan pertahanan. Negara ini menggunakan kebijakan internasional yang agresif untuk mengelola masalah internalnya, dengan pengeluaran militer yang meningkat pesat. Hipotesis ini juga disebut hipotesis yang sah.

Uraian anggaran pertahanan Indonesia pada masa pandemi covid 19 menjelaskan penggunaan anggaran pertahanan bahwa anggaran pertahanan adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk membiayai angkatan bersenjata negara, termasuk angkatan darat dan angkatan udara. dan Angkatan Laut, serta komando, cadangan militer, peralatan administrasi dan komponen pendukung, termasuk kelompok milisi dan bea cukai dan penjaga perbatasan, dilatih dalam taktik dan peralatan militer oleh otoritas militer. Tentu saja, alokasi untuk kesejahteraan prajurit harus tetap menjadi prioritas, yang diuraikan di bawah ini:



Gambar 1. Realisasi Anggaran Pertahanan Ta. 2020<sup>2</sup>

Menurut Kementerian Keuangan, realisasi anggaran pertahanan Indonesia tahun 2020 sebesar Rp136,87 triliun. Dibandingkan tahun lalu, angka tersebut meningkat 18,66%, yakni hanya Rp 115,35 triliun. Kementerian Pertahanan sendiri merealisasikan anggaran sebesar Rp 34,62 triliun atau 25,3% dari total anggaran pertahanan tahun sebelumnya. Belakangan, Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengumumkan realisasi anggaran Rp 10,37 triliun atau 7,58 persen. Selain itu, anggaran Markas Besar (AD) tercatat Rp 56,85 triliun atau 41,54% dari total realisasi anggaran tahun lalu. Pelaksanaan ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran lainnya. Setelah itu, anggaran TNI Angkatan Laut (AL) terealisasi Rp 19,78 triliun (14,43%), dan anggaran Mabes TNI AU terealisasi Rp 15,24 triliun (11,13%). Berdasarkan kategori belanja, anggaran pertahanan terbesar adalah untuk biaya personel, yaitu Rp48,69 triliun atau 35,37% dari total anggaran tahun 2020. Anggaran terbesar berikutnya adalah Rp44,91 triliun atau 32,82% untuk belanja modal dan Rp43,28 triliun atau 31,62% untuk pengeluaran komoditas. Nilai Alutsista Kemhan meningkat sebesar Rp10,88 triliun (9,3%) menjadi Rp127,7 triliun pada tahun 2020 dibandingkan Rp116,82 triliun pada tahun 2019. Dalam RAPBN Presentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar Rp134,08 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 11,6 persen dari proyeksi tahun 2021 sebesar Rp120,16 triliun.



Gambar 2. Realisasi Anggaran Pertahanan Ta. 2021<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sumber data dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/04/realisasi-anggaran-pertahanan-rp-13687-triliun-pada-2020>. Pada 27 Desember 2022.

<sup>3</sup> Sumber data dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/27/anggaran-kementerian-pertahanan-naik-78-pada-2021>. Pada 27 Desember 2022.

Pemerintah mengalokasikan Rp 137,3 triliun kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk anggaran 2021, lebih tinggi 14,12% dari pagu anggaran tahun lalu. Anggaran Kementerian Pertahanan tahun ini juga merupakan yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Sebagian besar anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2021 diarahkan untuk program dukungan administrasi. Jumlahnya Rp 76,3 triliun atau 55,6% dari total anggaran. Disusul dengan program modernisasi alutsista, alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan senilai Rp43,1 triliun atau 31,4% dari total anggaran.

Belakangan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto mendapat alokasi anggaran sebesar Rp133,920 miliar dalam RAPBN 2022. Jumlah tersebut meningkat 13 persen dibandingkan alokasi anggaran APBN Kemhan 2021. termasuk modernisasi. program untuk perlengkapan sistem senjata umum (Alutsista). Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk kebutuhan non Alutsist dan infrastruktur pertahanan (Sarpras). Total, Kementerian Pertahanan menganggarkan Rp 43,26 triliun untuk ketiga kebutuhan tersebut. Anggaran belanja khusus persenjataan Kementerian Pertahanan dalam usulan APBN 2022 sebesar Rp43,26 triliun, naik 33 persen dari APBN 2021 sebesar Rp32,48 triliun. Tampaknya pemerintah akan terus memprioritaskan dan bertindak strategis untuk mendukung penyelesaian MEF (Minimum Essential Force) secara bertahap<sup>4</sup>.

Pemutakhiran alutsista TNI dibagi menjadi dua program, yaitu untuk alutsista yang diperoleh sebelum kebijakan MEF (Minimum Essential Force) ditetapkan oleh pemerintah dan setelah MEF beroperasi. Alutsista pra-MEF dimutakhirkan untuk mempertahankan life cycle-nya agar dapat digunakan di masa mendatang sesuai dengan pengetahuan rantai pasokan logistik dan prajurit TNI yang mengawaki alutsista tersebut. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Rancangan Perpres tersebut menyatakan bahwa kebutuhan yang diantisipasi untuk alpalhankam dalam rencana strategis lima tahun (2020-2044) adalah \$124,99 miliar, atau 1.750 triliun rupee. Jangan sampai kita membakar janggut kita ketika kita melihat angka yang begitu besar. Amerika Serikat, sebagai negara adidaya tunggal, terus kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sistem pertahanan. Kami adalah negara besar dan luas, tentu saja kami layak mendapatkan kekuatan militer yang sangat besar. Memang saat ini harus disesuaikan dengan prioritas negara dalam menghadapi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun kita tidak boleh melupakan penguatan di bidang pertahanan dan keamanan.

Jika pandemi berlanjut, Kemhan harus menyiapkan langkah khusus untuk mencapai semua tujuan pembangunan strategis. Salah satunya adalah apakah tenggat waktu pencapaian rencana strategis tersebut dapat diperpanjang hingga tahun-tahun berikutnya. Keunggulan sektor pertahanan Tidak diragukan lagi, pembangunan sektor pertahanan sangatlah penting. Hal ini karena Indonesia secara geopolitik berada pada posisi yang sangat strategis sesuai dengan dinamika perang dunia. Secara internasional, Indonesia merupakan pusat kawasan Asia-Pasifik. Dimana perebutan hegemoni antara China dan Amerika Serikat sekarang. Tidak perlu jauh-jauh, Laut China Selatan kini menjadi medan pertempuran untuk menunjukkan kekuatan militer. Wilayah ini mengalami ketegangan yang meningkat dibandingkan dekade sebelumnya. Kabar terbaru, AS telah mengirimkan pesawat pengebom B-52 ke Laut China Selatan untuk menunjukkan kekuatan militer China. China juga menanggapi dengan memperkenalkan empat pembom H6-K baru untuk berpatroli di Laut China Selatan bersama Rusia sebelum Natal tahun ini. Suka tidak suka dan suka tidak suka, Indonesia harus menyadari

<sup>4</sup> Diakses dari: <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/556452/rapbn-2022-anggaran-pertahanan-rp133-92-triliun-sebagian-untuk-modernisasi-alutsista>. Pada 28 Desember 2022.

kondisi ini. Indonesia harus menyiapkan kekuatan pertahanan yang mumpuni, agar tidak terjadi apa-apa nantinya di Laut China Selatan.

Setidaknya dengan memperkuat pertahanan yang kuat dan mumpuni di wilayah Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Selama ini kekuatan pertahanan Indonesia di Laut China Selatan masih jauh tertinggal dari kekuatan pertahanan Amerika Serikat dan China. Selain faktor eksternal tersebut, Indonesia saat ini menghadapi ancaman internal yaitu separatisme dan terorisme. Peran sektor pertahanan sangat penting untuk menghapuskan separatisme dan terorisme serta mendukung kedaulatan negara. Gerakan separatis dan teroris merupakan ancaman nyata terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan seringkali menghambat pembangunan nasional. Penguatan kekuatan pertahanan juga untuk kepentingan mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan energi dalam batas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki tiga wilayah perbatasan yang kaya sumber daya energi.

Pertama, Blok D-Alpha Natuna terletak di lepas pantai Natuna, berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan beberapa negara, dengan cadangan gas sekitar 49,87 TCF. Dua blok Masela di Maluku yang berbatasan dengan Australia memiliki cadangan gas terbukti sebesar 10,7 TCF. Tiga perairan Ambalat yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Menurut Departemen ESDM, Blok Ambalat mengandung 764 juta barel minyak dan 1,4 TCF gas. Selain pemerintah mendorong ekspor melalui Kementerian ESDM, ketiga sektor ini juga membutuhkan kemampuan pertahanan. Hal ini karena negara lain tidak memiliki klaim teritorial langsung maupun tidak langsung karena ketiga wilayah tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Dengan lepasnya kawasan Sipadan dan Ligitan ke Malaysia pada tahun 2002, peran sektor pertahanan dalam pengamanan sumber energi perbatasan menjadi sangat penting.

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah harus tetap memprioritaskan pembangunan kekuatan pertahanan. Agar tidak menyimpang dari tujuan renstra dan negara lain, pemerintah harus mengutamakan kebutuhan modernisasi alutsista sesuai dengan ancaman internal dan eksternal yang ada. Salah satu strateginya adalah menekan biaya tenaga kerja yang saat ini sudah lebih dari 50 persen. Pembiayaan harus direduksi menjadi efisien dan operasional serta dialihkan ke komponen investasi pembelian Alutsista. Sebagai badan pelaksana pemerintahan bidang pertahanan, tugas utama Kementerian Pertahanan adalah merancang, menyiapkan dan melaksanakan strategi, perencanaan, potensi dan kebijakan pertahanan. Untuk mendukung misi inti ini, Departemen Pertahanan mengembangkan dan menetapkan program-program prioritas yang mencakup penambahan kekuatan pertahanan, modernisasi alutsista/non alutsista dan profesionalisme militer, serta kemampuan untuk operasi darat, laut, dan udara terpadu.

Terwujudnya pertahanan negara sangat tergantung pada besar kecilnya anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah. Sampai saat ini, besaran anggaran pertahanan ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi negara dan prioritas pembangunan. Menurut UU TNI, Pasal 25 menetapkan bahwa anggaran pertahanan bersumber dari APBN dan digunakan untuk pembangunan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengoperasian Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya. Pengelolaan anggaran pertahanan harus ditentukan oleh beberapa variabel yang memerlukan perhatian, misalnya:

1. Keadaan perekonomian nasional dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah dan prioritas pembangunan. Peningkatan anggaran pertahanan tidak boleh mempengaruhi efisiensi anggaran negara yang dapat menyebabkan peningkatan defisit fiskal.

2. Hubungan kebutuhan pertahanan, mengingat posisi militer yang ideal antara realitas geografis (ukuran wilayah), realitas demografis (penduduk), kebutuhan akomodasi (keinginan persamaan politik dengan negara lain) dan kebutuhan deterrence, pengembangan kekuatan militer Indonesia dari waktu ke waktu. Penyelesaian anggaran pertahanan secara proporsional menciptakan kemampuan pertahanan yang jera dan memberikan efek stabilitas yang mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).
3. Tingkat ancaman dan tingkat risiko. Yakni, mengatasi ancaman konflik dengan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga perbatasan Indonesia dengan pulau-pulau asing, serta membantu pemerintah mengatasi dampak bencana alam di beberapa daerah. Di era global, misi pertahanan negara juga menghadapi ancaman terorisme dan ancaman keamanan lintas batas, terutama kegiatan ilegal yang mengkonsumsi sumber daya alam di perairan Indonesia, seperti pembajakan, penangkapan ikan ilegal, dan gangguan keamanan maritim lainnya (Pertahanan Indonesia). Buku Putih, 2015).
4. Kekuatan minimum, i. H. tingkat kekuatan yang dapat dipastikan dengan keunggulan strategi pertahanan yang mendesak. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa langkah harus dilakukan, yaitu perolehan, pemeliharaan, dan pemusnahan alat pelindung (alat utama sistem senjata), serta penutupan celah bingkai secara kuantitatif dan kualitatif (Chrisnandi, 2007).
5. Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian regional dan global. Sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia, operasi pemeliharaan perdamaian global dan partisipasi di kawasan memerlukan kesiapan pertahanan negara yang sangat terlihat. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Sejak tahun 2012, kebijakan pemerintah untuk menurunkan personal cost merupakan optimalisasi dari kebijakan zero growth. Kebijakan ini merupakan reformasi birokrasi kekuatan pertahanan untuk memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk menyeimbangkan kuantitas. personel dan tugas. Kebijakan ini dinilai sangat penting di masa pandemi COVID-19 karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran pertahanan. Karena selama ini sebagian besar dihabiskan untuk biaya rutin personel, maka bisa diarahkan untuk pengembangan alutsista. Dalam implementasi kebijakan tersebut, penguatan riset di bidang industri pertahanan juga harus didukung penuh, agar Indonesia tidak terus bergantung pada alutsista yang diimpor dari negara lain.

## KESIMPULAN

Dihampir Seluruh negara saat ini sedang mengalami pandemi penyakit coronavirus (Covid-19), yang pertama kali muncul di pasar di Wuhan, China pada Desember 2019 dan sejak itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan I tahun 2020 berdampak pada kinerja perekonomian domestik. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 2,97%. Hampir semua industri tumbuh dengan lambat. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan global dan domestik serta melemahnya harga komoditas internasional. Situasi ini masih lebih baik dibandingkan kinerja negara lain. Seperti halnya di negara-negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Prospek pertumbuhan 2020 direvisi menjadi -0,4 hingga 2,3 persen dari target semula 5,3 persen, dengan mempertimbangkan perlambatan di hampir semua elemen PDB. Akibat COVID-19, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 695,2 triliun. Sebagian anggaran PEN berasal dari realokasi anggaran di kementerian dan/atau



lembaga nasional. Kementerian Pertahanan (Kemhan) memiliki anggaran terbesar dari semua kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, yaitu Rp. 131 triliun dalam APBN 2020. Nomor 54 Tahun 2020, anggaran Kementerian Pertahanan akan dipotong Rp. 122 triliun. Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menyusun Rencana Strategis Pengembangan Kekuatan Utama Pertahanan (Bangkuatpokhan) atau lebih dikenal dengan MEF (Minimum Essential Force), yang terdiri dari tiga rencana strategis. Renstra-I dimulai tahun 2010 - 2014, Renstra-II tahun 2015 - 2019 dan Renstra-III tahun 2020 - 2024.

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah harus tetap mengutamakan kemampuan pertahanan. Agar tidak menggagalkan rencana strategis dan tujuan nasional lainnya, pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan modernisasi alutsista karena ancaman internal dan eksternal saat ini. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya personel adalah dengan merampingkan kebijakan pertumbuhan nol yang diterapkan sejak tahun 2012. Kebijakan tersebut merupakan reformasi birokrasi ketenagakerjaan pertahanan yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk mencapai keseimbangan kuantitatif antar personel. dan stasiun. Kebijakan ini dinilai penting di masa pandemi COVID-19 karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran pertahanan. Dalam implementasi kebijakan ini, penguatan riset industri pertahanan juga harus didukung penuh, agar Indonesia bisa terbelang mandiri dari impor alutsista dari negara lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Ade Nurul. 2021. Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. Buletin APBN Vol. VI. Ed. 8.
- Akhmad Hanan. Alokasi Anggaran Pertahanan Terganjil Covid-19. Diakses dari: [cnbcindonesia.com/opini/20201228134247-14-211927/alokasi-anggaran-pertahanan-terganjal-covid-19](https://cnbcindonesia.com/opini/20201228134247-14-211927/alokasi-anggaran-pertahanan-terganjal-covid-19). Diakses pada 27 Desember 2022.
- Andi Triyawan, Zuhdiana El Ummah Fendayanti. 2021. Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi. FORUM EKONOMI ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X 223.
- Bakrie, Connie R. 2007. Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chrisnandi, Yuddy. 2007. "The Political Dilemma of Defence Budgeting in Indonesia," UNISCI Discussion Papers, No.15.
- Departemen Pertahanan Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta. Diakses dari: <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/556452/rapbn-2022-anggaran-pertahanan-rp133-92-triliun-sebagian-untuk-modernisasi-alutsista>. Pada 28 Desember 2022.
- Diakses dari: <https://www.beritasatu.com/nasional/781137/di-tengah-upaya-melawan-covid19-indonesia-jangan-lupa-perkuat-pertahanan>. Pada 27 Desember 2022
- Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20201228134247-14-211927/alokasi-anggaran-pertahanan-terganjal-covid-19>. Pada 27 Desember 2022
- Diakses dari: <https://www.dw.com/id/pandemi-corona-mengubah-paradigma-pertahanan-dan-keamanan/a-53264617>. Pada 27 Desember 2022
- Diakses dari: <https://www.kemhan.go.id/2021/01/13/menhan-sampaikan-kebijakan-pertahanan-negara-tahun-2021-diantaranya-melanjutkan-penanganan-covid-19.html>. Pada 27 Desember 2022
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson Kennedy. 2016. Motivasi Negara dalam Menentukan Anggaran Pertahanan, *Fundamental Management Journal*, 1(2), 50-59.

- Muhaimin, Yahya A. 2008. *Bambu Runcing dan Mesiu Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Tiara Kencana.
- Panjaitan, Luhut. 2016. "Menciptakan Stabilitas Melalui Peningkatan Pertahanan dan Pemerataan Ekonomi". Seminar Universitas Indonesia, 20 April 2016.
- Sloan, Elinor. 2008. *Military Transformation and Modern Warfare: A Reference Handbook*, Westport: Praeger Security International.
- Sumber data dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/04/realisasi-anggaran-pertahanan-rp-13687-triliun-pada-2020>. Pada 27 Desember 2022
- Sumber data dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/27/anggaran-kementerian-pertahanan-naik-78-pada-2021>. Pada 27 Desember 2022.